

KINERJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Purwoko

Abstract

Developmental process has been implementasi sing in indonesia since 1969, about almost 45 years. As long as time developmental mean as physical developmental in any aspects meters as GNP, Income Percapita and Economic Growth the indicators coult not described the real developmental results in such country or such area it is needed another non economic variables as social variables whick some indicators as evendistribusion, evenhealth cares in one composite. Inditional social variabless ould describe development performance of Pekalongan lokal Government (Kabupaten Pekalongan) more comprehensive. Reminded that developmental performance the main pillar of state stability.

Keywords: developmental performance, developmental indicators, economic indicators, social indicators

A. PENDAHULUAN

Proses pembangunan di Indonesia telah berlangsung lebih dari 40 tahun, terhitung sejak berubahnya tatanan politik dari rezim Orde Lama ke rezim politik Orde Baru pada tahun 1967. Dua tahun kemudian, pada tahun 1969 dicanangkan Pembangunan Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.

Selama itu pula, pembangunan dimaknai sebagai pembangunan fisik semata-mata dengan parameter, indikator atau tolok ukur yang kasat mata dan konkrit seperti berapa kilometer jalan raya yang berhasil dibangun, berapa bendungan atau dam yang dihasilkan atau berapa gedung yang didirikan. Atau paling banter / jauh dari itu adalah pembangunan bidang ekonomi saja dengan tolok ukur dan indikator yang bersifat ekonomi seperti GNP (Gross National Product), Income per Capita, Tabungan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi, dan lain-lain yang kemudian ternyata kurang dapat menggambarkan realita keberhasilan pembangunan di suatu negara. Sebetulnya hal itu telah disadari oleh banyak ahli dari berbagai negara pada akhir dekade 1970-an. Atas dasar pemahaman baru mengenai pembangunan kemudian, pada dekade akhir 1980-an parameter, tolok ukur dan indikator ekonomi masih digunakan tetapi dilengkapi dengan parameter, tolok ukur dan indikator lain seperti sosial, politik dan kelestarian lingkungan.

Menjelang millenium 21, konsep-konsep baru pembangunan itu telah

diterima secara luas oleh sebagian besar negara berkembang dengan berbagai improvisasi berdasarkan kondisi dan situasi masing-masing negara. Tetapi yang jelas konsep dan paradigma yang baru tadi lebih dapat memotret realitas pembangunan dan hasil-hasil nya secara lebih akurat.

Beberapa ahli memasukan konsep seperti MASOL (Minimum Acceptable Standart of Living) misalnya untuk mengukur sejauh mana proses pembangunan di negara itu mencapai keberhasilan.

Ada juga beberapa ahli yang mengajukan konsep Social and Human Index, dengan tolok ukur dan indikator seberapa besar angka kematian bagi per 1.000 kelahiran dan angka harapan hidup di negara tersebut. Demikian pula muncul pemikiran baru dengan konsep-konsep yang pada intinya adalah tidak saja membuat atau memasukkan tolok ukur dan indikator yang bersifat pertumbuhan saja, tetapi sampai pada konsep sustainability (keberlanjutan) seperti misalnya konsep keberlangsungan pembangunan jika timbul gejala sosial politik akibat gap atau celah yang menganga atau melebar antar strata masyarakat atau antar wilayah. Keberlanjutan pembangunan digunakan oleh eksploitasi alam secara terus menerus tanpa henti. Pentingnya aspek lain selain ekonomi dan fisik ini menarik untuk diteliti oleh karena itu penulis mencoba mengangkat tema pembangunan sosial sebagai substansi penelitian yang

merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pengajar Perguruan Tinggi.

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan disini adalah bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam pembangunan sosial di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan yang dipilih dengan pertimbangan, penulis mencoba memunculkan perspektif/paradigma baru dalam konsep pembangunan yang sampai saat ini masih saja sering menggunakan pembangunan fisik dan ekonomi sebagai barometernya. Pemerintah Daerah Kabupaten dipilih dengan pertimbangan bahwa Kabupaten lah yang merupakan Daerah Otonom paling bawah yang mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau merupakan lembaga Pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal kebijakan, program dan proyek pembangunan.

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau kontribusi pengembangan keilmuan tentang salah satu aspek dalam studi pembangunan pada khususnya dan politik pembangunan pada umumnya. Kontribusi secara spesifik terletak pada keterkaitan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dalam proses pembangunan dengan keberlangsungan atau eksistensi kehidupan mereka. Pembangunan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka akan mengakibatkan destabilitas.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh banyak negara berkembang pada dekade 1960-1970 merupakan pembangunan yang blue print nya (cetak birunya) dari PBB yang mengeluarkan suatu konsep pembangunan "Dasawarsa Pembangunan I". Dalam konsep tersebut, parameter dan indikator pembangunan dinyatakan dalam pertumbuhan ekonomi tahunan, Produk Nasional Bruto (PDB), pendapatan per kapita penduduk. Suatu parameter dan indikator untuk mengukur Economic Wealth being penduduk, yaitu seberapa banyak barang dan jasa tersedia untuk konsumsi dan investasi bagi rata-rata penduduk (Todaro). Kemudian muncul reaksi lain terhadap kegagalan parameter dan indikator di atas menjelaskannya meningkatnya ketimpangan dan ketidak merataan dalam pembagian pendapatan yang terselubung dibalik

angka-angka keberhasilan pembangunan. Masih ada corak ekonomi dalam konsep aliran baru ini, tetapi ada perubahan fundamental dalam cara memberi makna pembangunan. Tokoh Utama pendukung indikator neo ekonomi ini adalah Sir Dudley Seers yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara yaitu apa yang tengah terjadi dengan pengangguran dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. Apabila jawaban atas ketiga hal tersebut adalah terjadi penurunan secara substansial dan signifikan, maka tidak diragunakj lagi bahwa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan. Pembaharuan konsep-konsep pembangunan ini berlanjut dengan munculnya konsep parameter dan indikator sosial yang berupaya memperkenalkan jargon seberapa baik bukannya jargon seberapa banyak, dan tidak mengutamakan kualitas barang kita, tetapi lebih pada kualitas hidup kita (Bauer). Untuk itu mereka menambahkan indikator lain disamping ekonomi seperti : Pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan sebagainya.

Konsep pembangunan ini kemudian meluas tidak saja sampai pada hal-hal yang tangible, namun mulai mencakup hal-hal yang intangible seperti misalnya yang dikemukakan oleh Dennis Goulet. Dia menyatakan pembangunan mempunyai 3 komponen utama, yakni : kelangsungan hidup (life sustenance), khormatan diri (self esteem) dan kebebasan (Freedom). Selanjutnya Goulet mengemukakan bahwa kebebasan ini mencakup kebebasan dari pengasingan terhadap hak hidup material yang layak, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kesengsaraan dan kemelaratan. Dengan pemenuhan dari hal-hal di atas maka akan tercipta manusia yang memiliki kehormatan diri dan kemuliaan sebagaimana layaknya manusia.

Dari berbagai konsep yang muncul, kiranya dapatlah dirangkum suatu konsep pembangunan baru yang pada intinya adalah merupakan konsep pembangunan Berdimensi Kerakyatan yang mengandung 4 dimensi seperti yang dikemukakan oleh banyak ahli (Moeljanto, Arief Budiman, David Korten, Syahrir dll) :

1. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pertumbuhan penduduk hanya akan menambah pengangguran.
2. Ketidakadilan ekonomi sosial dan kemiskinan absolut harus dikurangi secara berarti. Kemiskinan dan ketidakadilan yang terus berlangsung akan mudah memicu gejolak sosial dan politik.
3. Pengertian partisipasi dalam pembangunan bukan semata-mata dalam pelaksanaan program saja tetapi juga sampai pada perencanaan dan kebijakan pembangunan yang emansipatif. Emansipasi ini ditunjukkan oleh kesetaraan dan kemandirian dalam proses pembangunan.
4. Pembangunan berwawasan lingkungan yang secara hukum diperkuat dengan produk perundang-undangan dari Amdal (Analisa Dampak Lingkungan) perlu membudaya dalam praktek kegiatan pembangunan sehari-hari.

Basis artikel ini adalah penelitian dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif dalam arti berupaya memberikan analisis dan menjelaskan kinerja dalam bentuk kuantitatif atas beberapa indikator pembangunan yang tangible atau measurable, kemudian mengkonversi menjadi kategori-kategori kualitatif.

2. Tipe Penelitian

Evaluatif: Memberi penilaian atas kinerja suatu instansi, institusi atau lembaga dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun disadari bahwa menilai suatu kinerja lembaga tidak lepas dari pengaruh kinerja atau performance pihak lain, tetapi paling tidak disini ada semacam andil yang diberikan oleh

B. PEMBAHASAN

B.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu daerah otonom yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis mempunyai bentuk memanjang dan utara ke selatan. Di

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pembangunan karena mereka adalah unit daerah otonom paling langsung bersinggungan dengan rakyat.

3. Locus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu locus atau tempat/area penelitiannya adalah wilayah Kabupaten Pekalongan berikut berbagai bidang yang melingkupinya. Untuk itu peneliti berusaha memperoleh data dan informasi baik pada tataran Supra Struktur Pemerintahan seperti : Eksekutif dan Legislatif maupun pada tataran infra struktur seperti LSM, BPD atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut.

4. Sumber Data/Informasi

Data/informasi primer diperoleh dari jajaran Eksekutif Pemda seperti Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda. Selain itu juga dari jajaran Legislatif seperti Ketua Dewan dan anggota-anggota Dewan serta beberapa tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder akan digali dari buku Kabupaten Dalam Angka secara time series.

5. Teknik Pengumpulan Data

Koleksi data dan informasi primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*depth interview*). Data sekunder diperoleh melalui pencuplikan terhadap arsip/buku data/informasi yang relevan.

6. Analisis Data

Reduksi data, pengorganisasian data, interpretasi data.

7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni jumlah indikator/tolok ukur yang masih kurang memadai, lokasi penelitian kurang representatif mengingat dari 35 kabupaten/kota di Jateng hanya diambil 1 kabupaten. Selain itu, ada keterbatasan pada data/informasi time series yang tidak menjangkau saat paling kini (*recent time*).

bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa yang secara astronomis terletak pada 6°83' - 7°23' Lintang Selatan dan 109°49' - 109°78' Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan

Laut Jawa maka dan 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 8 desa pantai.

Kabupaten Pekalongan secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Kota Pekalongan dan Laut Jawa, Sebelah Timur Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, Sebelah Selatan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga dan Sebelah Barat Kabupaten Pemalang.

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk

dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di kabupaten ini berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, ada 60 desa/kelurahan (20%) berada di kawasan dataran tinggi dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah.

Kabupaten Pekalongan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan memiliki luas wilayah 836,13 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan dengan 272 desa dan 13 kelurahan.

Tabel 5.1
Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan per Kecamatan

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LUAS	
			(Km ²)	%
1	Kandangserang	14	60,55	7,24
2	Paninggaran	15	92,99	11,12
3	Lebakbarang	11	58,20	6,96
4	Petungkriyono	9	73,58	8,80
5	Talun	10	58,57	7,00
6	Doro	14	68,45	8,19
7	Karanganyar	15	63,48	7,59
8	Kajen	25	75,15	8,99
9	Kesesi	23	68,52	8,19
10	Sragi	17	32,40	3,87
11	Siwalan	13	25,91	3,10
12	Bojong	22	40,06	4,79
13	Wonopringgo	14	18,80	2,25
14	Kedungwuni	19	22,94	2,74
15	Karangdadap	11	20,99	2,51
16	Buaran	10	9,54	1,14
17	Tirto	16	17,39	2,08
18	Wiradesa	16	12,71	1,52
19	Wonokerto	11	15,90	1,90
JUMLAH		285	836,13	100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Pekalongan, 2014

Ketinggian wilayah Kabupaten Pekalongan berada pada kisaran antara 0 – 1.294 meter di atas permukaan laut (dpL), dengan wilayah terendah berada di Kecamatan Wonokerto dan wilayah tertinggi di Kecamatan Petungkriyono.

Penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan dengan luas total 83.613,06 Ha, dapat dibagi menjadi yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Pada tahun 2013, luas lahan sawah sebesar

24.871,51 Ha (29,75%) dan luas lahan bukan sawah sebesar 58.741,56 Ha (70,25%). Sebagian besar luas lahan sawah merupakan sawah beririgasi teknis 19.930,67 Ha (80,13%), 4.286,54 Ha (17,23%) dan sisanya seluas 654,29 Ha (2,63%). Sementara untuk lahan bukan sawah sebagian merupakan hutan negara sebesar 26.218,96 Ha (44,63%), berupa rumah, bangunan dan halaman sebesar 21.649,57 Ha (36,86%) dan sisanya

10.873,03 Ha (18,47%) merupakan tegalan atau kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/empang, padang rumput serta rawa-rawa.

Wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki iklim tropis, dengan rata-rata hari hujan per tahun pada tahun 2013 adalah 143 hari dengan curah hujan rata-rata 2.992 mm.

B.2. Gambaran Demografis

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan tahun 2013 sebanyak 861.082 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 427.815 jiwa dan perempuan sebanyak 433.267 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 854.337 jiwa. Dimana tahun 2012 jumlah penduduk laki-laki 424.465 jiwa dan perempuan 429.872 jiwa, berarti meningkat sekitar 0,80 persen atau bertambah sebanyak 6.745 jiwa.

Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk alami (fertilitas dan mortalitas), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi keuar yang lebih besar daripada migrasi masuk (migrasi neto negatif) atau dengan kata lain penduduk yang keluar lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang masuk Kabupaten Pekalongan. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 836,13 Km² sehingga rata-

rata kepadatan penduduk adalah 1.030 jiwa per Km².

Dilihat dari sebaran penduduknya untuk masing-masing kecamatan terlihat belum merata. Ada tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa, yaitu Kecamatan Wiradesa, Kedungwuni dan Buaran. Namun demikian, masih ada dua kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya masih dibawah 200 jiwa, yaitu Kecamatan Lebakbarang dan Petungkriyono.

B.3. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu lima tahun terus menerus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan capaian positif para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Kondisi ini harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan kinerja para pelaku pembangunan di bidang kesra sehingga kondisi sosial ekonomi di kabupaten Pekalongan semakin mantap. Pada tahun 2013 penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tercatat 116.500 jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan selama 2009 – 2013 cenderung mengalami penurunan. Prosentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 13,51% turun dari tahun 2012 sebesar 13,86%. Hal ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 14,44% pada tahun 2013. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya untuk selalu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan menuju target *Millenium Development Goal's* (MDG's) tahun 2015.

Tabel 5.2
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009 – 2013

CAKUPAN WILAYAH	PROSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Pekalongan	17,93	16,29	15,00	13,86	13,51
Jawa Tengah	17,48	16,11	16,21	14,98	14,44
Nasional	14,15	13,33	12,36	11,66	11,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2014

Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan hingga ke Desa-desa di pedalaman. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan. Jika dibandingkan dengan target-target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, pencapaian pengentasan kemiskinan masih belum memenuhi target capaian kinerja pada RPJMD.

B.4. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya

dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Sektor-sektor ekonomi lokal yang mempunyai potensi diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan bahkan menjadi sektor unggulan. Sejalan dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sistem ekonomi yang dijalankan diharapkan dapat memberikan peran kepada usaha di tingkat komunitas dengan skala mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini peran UKM sebagai pelaku usaha lokal secara optimal dan menggunakan teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih bersaing baik di pasar nasional maupun internasional.

Berdasarkan kajian ekonomi, distribusi PDRB berdasarkan Harga Konstan 2000 rata-rata selama lima tahun terakhir di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Distribusi Sektoral PDRB atas dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten Pekalongan Periode 2010 – 2014

NO	LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI TERHADAP TOTAL PDRB' (%)						URUTAN
		2010	2011	2012	2013	2014*)	RATA-RATA	
1	Pertanian	21,6 6	20,6 5	20,3 6	19,7 7	19,79	20,45	2
2	Pertambangan dan Penggahan	1,02	1,01	1,02	1,01	0,98	1,01	9

NO	LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI TERHADAP TOTAL PDRB' (%)						URUTAN
		2010	2011	2012	2013	2014*)	RATA-RATA	
3	Industri Pengolahan	25,9 4	26,4 3	26,4 4	26,7 8	26,65	26,45	1
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,15	1,15	1,16	1,18	1,16	1,16	8
5	Bangunan	6,26	6,31	6,29	6,28	6,36	6,30	5
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,6 3	19,0 6	19,2 2	19,4 1	19,33	19,13	3
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,96	3,93	3,08	4,00	4,01	3,98	7
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,37	4,38	4,44	4,57	4,55	4,46	6
9	Jasa-jasa	17,0 1	17,0 8	17,0 8	17,0 1	17,16	17,07	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2014 (Data Sekunder Diolah)
Keterangan: *) Angka Sementara

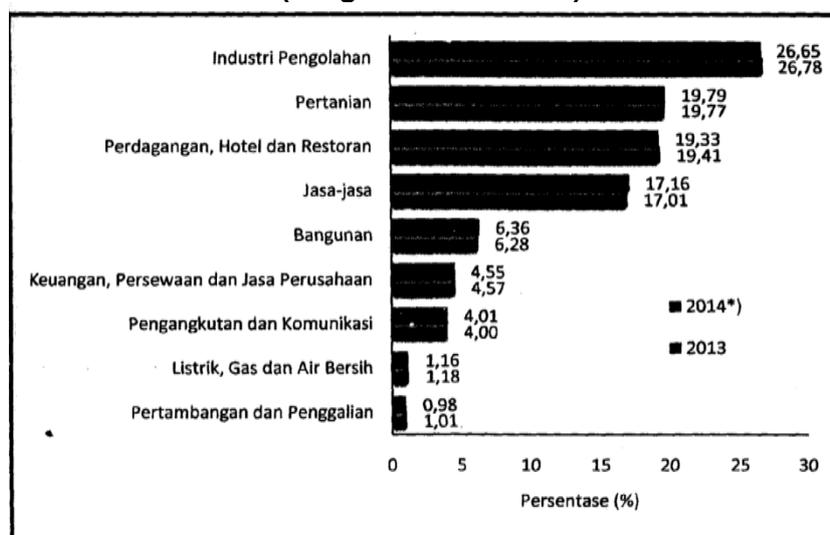
Dari tabel tersebut terlihat bahwa Sektor Industri Pengolahan masih merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Pekalongan. Hal ini ditunjukkan oleh paling besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan selama lima tahun terakhir yang mencapai 26,45%.

Kontribusi sektor terbesar kedua adalah Sektor Pertanian dengan rata-rata selama lima tahun terakhir mencapai 20,45%. Sedangkan, kontribusi sektor

terbesar ketiga disumbangkan oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan sumbangan rata-rata selama lima tahun terakhir mencapai 19,13%.

Grafik berikut menggambarkan kontribusi sektoral PDRB di Kabupaten Pekalongan selama periode 2013 – 2014*) yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (sektor Industri Pengolahan) hingga nilai kontribusi terkecil (Sektor Pertambangan dan Penggalian) dengan menggunakan Harga Konstan 2000.

Gambar 5.1
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Pekalongan Periode 2013 – 2014*)
(Harga Konstan 2000)



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2014
Keterangan: *) Angka Sementara

Seiring dengan kontribusinya yang besar terhadap PDRB, Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pertanian; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan tiga sektor yang menyerap tenaga terbanyak di Kabupaten Pekalongan. Secara bersama-sama ke tiga sektor tersebut telah menyerap lebih dari 75% tenaga kerja.

Dari sektor unggulan tersebut, maka produk dan komoditas unggulan berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

1) Sektor Industri Pengolahan

Industri di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah, tenaga kerja yang terserap maupun dari nilai produksinya. Sampai dengan tahun 2014,

tercatat 32.250 unit usaha (industri besar, sedang maupun industri kecil) dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 184.523 orang dengan nilai investasi mencapai 1,197 trilyun rupiah dan nilai produksi mencapai 5,045 trilyun rupiah.

Berdasarkan sumbangan terhadap jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, industri yang unggul di Kabupaten Pekalongan yaitu Pertenunan, Batik, Bordir, Pakalan Jadi, Jeans, Pengolahan Ikan, Gula Aren dan Anyaman Bambu.

2) Sektor Pertanian

Pada Sektor Pertanian, komoditas yang unggul dan kompetitif di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta komoditas yang cukup potensial untuk dikembangkan yaitu :

Tabel 5.4
Komoditas Sektor Pertanian di Jawa Tengah

Unggulan	Tanaman Pangan	Padi Sawah
	Hortikultura	Bawang Daun, Lobak, Kacang-Kacangan dipanen > 1 kali, Ketimun, Belimbing, dipanen > 1 kali, Ketimun, Belimbing, Durian, Jambu Biji, Mangga, Manggis, Nangka, Pisang, Rambutan, Sirsak, Sukun, Jengkol, Mlinjo, Petai.
	Perkebunan	Tebu, Teh, Panili
	Peternakan	Ayam Kampung, Itik, Kuda, Kerbau, Kambing, Domba
	Perikanan	Ikan Darat
	Kehutanan	Pinus
Potensial	Tanaman Pangan	Padi Ladang, Ketela Rambat
	Hortikultura	Kentang, Kangkung
	Perkebunan	Cengkeh, Kopi, Aren, Glagah Arjuno, Nilam
	Peternakan	Sapi Potong
	Perikanan	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014

3) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Selanjutnya melihat nilai output pada Sub Sektor Perdagangan komoditi sub-sub sektor industri memberikan kontribusi cukup dominan sebesar 61,90% disusul Sub-sub Sektor Pertanian sebesar 18,43%. Jadi komoditas pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian menjadi unggulan untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

4) Sektor Jasa-Jasa

Sektor lainnya yang mempunyai kontribusi cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Pekalongan adalah Sektor Jasa-jasa. Sub sektor yang akan diidentifikasi pada Sektor Jasa-Jasa yaitu Jasa Hiburan dan Rekreasi terutama Bidang Pariwisata, karena kondisi existing menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan mempunyai banyak potensi Pariwisata yang dapat dikembangkan.

Adapun potensi unggulan di Sub Sektor Pariwisata yaitu:

Tabel 5.5
Potensi Unggulan di Sub Sektor Pariwisata

KECAMATAN	UNGGULAN	ANDALAN	POTENSIAL
Kandangserang	-	-	Wisata budaya
Paninggaran	Perkebunan Teh Paninggaran	-	Makam Wali Tanduran, Wisata budaya
Lebakbarang	-	-	Curug Ciride, Wisata budaya
Petungkriyono	Kawasan ekowisata	-	Lingga Yoni, Wisata budaya
Talun	-	-	Wisata budaya
Doro	-	-	Makam Ki Ageng Rogoselo, Makam Atas Angin, Makam Syekh Siti Jenar, Wisata budaya
Karanganyar	Kabalog, Jembatan Lolong	Kulu Asri, Tirta Alam, Prima Graha	Makam Habib Abdurrahman, Makam Syekh Abu Bakar Bin Toha Bin Yahya, Wisata budaya
Kajen	Hutan Wisata Linggoasri	-	Goa Putri, Wisata budaya, Kali Paingan
Kesesi	-	-	Makam Mbah Gendhon, Wisata budaya
Sragi	-	-	Wisata budaya
Siwaan	Pantai Depok	-	Wisata budaya
Bojong	-	-	Bendungan Gembro, Makam Siti Ambaryah, Wisata budaya
Wonopringgo	-	-	Wisata budaya
Kedungwuni	Sentra Jeans	Sentra kerajinan tempurung kelapa	Wisata budaya
Karangdadap	-	Sentra bordir	Wisata budaya
Buaran	Sentra ATBM	-	Masjid Wonoyoso, Wisata Budaya
Tirto	-	-	Wisata budaya
Wiradesa	Kampung Batik, Wiradesa, International Batik Center	Banyu Biru	Makam Mbah Faqih, Wisata budaya
Wonokerto	Pantai Wonokerto	-	Wisata budaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB

atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 kinerja ekonomi Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%, lebih tinggi dari tahun 2013

yang sebesar 5,45%. Untuk tahun 2013 ini sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan secara positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Keuangan Perusahaan dan Jasa Perusahaan yang

tumbuh 6,93% sedangkan terendah terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,98%. Selengkapnya pada tabel berikut ini :

Tabel 5.6
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pekalongan
atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010 – 2014*)

SEKTOR	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014*)
1. Pertanian	3,61	(0,09)	3,83	2,38	4,21
2. Pertambangan dan Penggalian	(2,55)	3,97	5,57	5,13	3,98
3. Industri Pengolahan	4,23	6,74	5,38	6,79	6,28
4. Listrik, Gas dan Air	5,82	4,50	6,14	7,18	5,90
5. Bangunan	4,17	5,57	5,00	5,20	6,41
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,31	7,16	6,21	6,49	6,09
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,76	4,11	6,72	6,04	5,92
8. Keuangan Perush. dan Jasa Perush.	4,96	4,99	6,90	8,45	6,93
9. Jasa-jasa	5,00	5,19	5,37	4,97	5,99
Pertumbuhan PDRB (%)	4,27	4,77	5,32	5,45	5,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan, 2014

Keterangan: *) Angka Sementara/Prediksi Sementara

3. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dan satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Sepanjang tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan telah terjadi inflasi

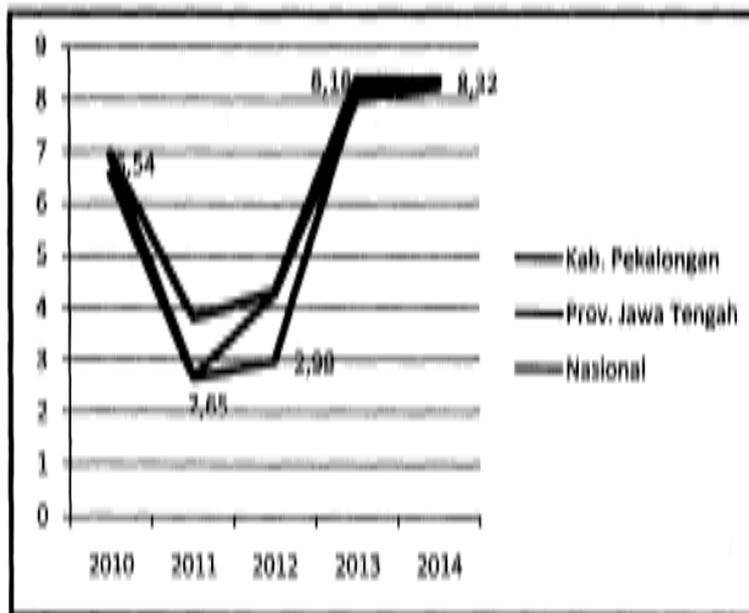
yang sangat tinggi yang mencapai 8,32%. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Pemerintah per 18 November 2014 dan diikuti oleh kenaikan komoditas lainnya menjadi penyebab tingginya inflasi ada tahun 2014 ini. Perbandingan Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.7
Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014

CAKUPAN WILAYAH	Tingkat Inflasi %				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Pekalongan	6,54	2,65	2,98	8,18	8,32
Jawa Tengah	6,88	2,68	4,24	7,99	8,2
Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

Gambar 5.2
Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014

1. Koordinasi dan rekonsiliasi terkait dengan penerimaan bagi hasil pajak pusat propinsi
2. Mengajukan usulan program kegiatan yang diharapkan pembiayaannya dan pemerintah propinsi melalui Dana Bantuan Keuangan.

B.5. Kinerja Ekonomi Makro

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu indikator kemampuan daerah dalam pembangunan secara konvensional adalah dengan mengukur seberapa besar PAD atau Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Kabupaten pekalongan pada tahun anggaran 2014 capaian kinerja PAD sebesar Rp. 225.037.017.191.46 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 213.752.969.00 atau melampui target 119.30 %. Namun jumlah tersebut terhitung masih target rendah dari total pendapatan daerah , hanya sebesar 17.30 % idealnya secara ekonomi capainya adalah lebih dari 50 % total pendapatan daerah atau kontribusi PAD lebih dari 50 % total pendapatan daerah.

Kontribusi yang belum belum besar ini disebabkan oleh belum banyaknya sektor sektor yang berkembang di masyarakat selain itu sumbangan masing – masing sektor juga belum secara signifikan atau menyakinkan menambah PAD Kab. Pekalongan. Tiga besar sektor yang memberi kontribusi terbesar dalam PDRB adalah :

- 1) Industri pengolahan sebesar 26.45%
- 2) Pertanian sebesar 20.45%
- 3) Pendapatan , Hotel dan Restoran sebesar 19.13 %

Sektor pengangkutan dan komunikasi dan keuangan persewaan, perusahaan serta sektor jasa – jasa menunjukkan sektor yang memberi andil besar dalam PDRB.

Peningkatan besaran dan jenis PDRB ini tempat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi serta berapa besar tenaga kerja yang bisa diserap oleh aktivitas ekonomi itu. Rentetan selanjutnya adalah seberapa besar penghasilan percapita penduduk dan kesejahteraan Income percapita mereka.PAD yang agak rendah ini sulit untuk mendorong pemda melakukan semacam “ Big Push ” ekonomi seperti investasi – investasi yang dapat mendongkrak kemampuan masyarakat, menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Data tahun 2014 mengenai Income percapita yang dikeluarkan oleh Pemda kab. Pekalongan menunjukkan sebesar 3.760.000 per tahun,

jadi kira – kira hanya sebesar 310.00 perbulan. Angka ini merupakan faktor rata –rata tiap (orang perkapita) jadi masih banyak penduduk atau masyarakat yang mempunyai pendapatan lebih rendah dari itu .Income percapita ini belum menggambarkan kondisi sesungguhnya income / pendapatan kerana merata atau rata –rata ini dapat berarti ada sejumlah kecil penduduk atau lapisan masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi , di lain pihak ada sejumlah besar penduduk yang berpenghasilan rendah.

Menurut Demografi Kab. Pekalongan ada tiga kecamatan yang mempunyai penduduk padat yakni wiradesa, kedungwuni dan Buaran, kecamatan pertama berkarakter wilayah dataran berbatas laut dimana penduduk sebagai nelayan yakni buruk nelayan.

Sebagian besar yang lain di wiradesa , kedungwuni dan buaran bermata pencaharian sebagai buruh industri kecil / rumahan dan industri pengolahan. Ketiga kecamatan ini ekonominya bertumpu pada industri batik dan tekstil sedangkan kecamatan kecamatan lain masih bertumpu pada pertanian. Kecmatan yang tingkat pendapatan atau densitasnya rendah adalah lebakbarang dan petungkriono dengan karakter sebgaiian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian/ perkebunan . Tidak ada industri besar / berat serta belum berkembangnya sektor – sektor lain seperti perdagangan, pariwisata serta perhotelan dan restoran mengakibatkan perekonomian kab.Pekalongan belum terdiversifikasi secara merata . Belum berkembangnya prekonomian ini mempengaruhi income percapita penduduk . sesungguhnya telah terjadi peningkatan anggaran Income percapita tiap tahun, tetapi masih kurang signifikan , karena setaiap kenaikan selalu diikuti dengan kenaikan Inflansi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Konvensional lain dari keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, untungnya patokan atau pedoman pertumbuhan ekonomi ini adalah angka pertambahan jumlah penduduk di tambah sekian persen, hal ini di dasrkan pada asumsi bahwa pertumbuhan yang sama atau di bawah

angka pertumbuhan penduduk menunjukkan ketidakmampuan sektor ekonomi wilayah tersebut. Untuk menopang dan memberi peluang kerja bagi masyarakat. Data dari tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukka pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi. Tahun 2009 sebesar 4.30% ,Tahun 2010 menurun hanya sebesar 4,27 %. Tahun 2011 naik menjadi 4.77%, Tahun 2012 naik menjadi sebesar, 5.23% dan tahun 2013 menjadi .5.45 %. Tahun 2015 ini diperkirakan menurun karena sacara nasional pertumbuhan ekonomi tidak begitu optimistik.

3. Inflasi

Indikator ekonomi konvensional lain adalah angka inflansi daerah . data resmi yang direlease oleh Pemda Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa angka ininflasi dari tahun ke tahun mengalam kenaikan yang cukup signifikan menjadi 3,39%, tahun 2010 naik menjadi cukup signifikan menjadi sebesar 6.59%. Tahun 2011 turun signifikan menjadi 2,65 % dan tahun 2012 naik sedikit menjadi 2.93%, tetepi tahun 2013 naik sempat tanjam menjadi 8.80 %. Tahun 2014 akhir dan 2015 diperkikan naik lagi meningkat tahun itu pemerintah menaikkan harga BBM. Karena biasanya kenaikan BBM memicu munculnya inflasi atau melesatnya inflansi, inflasi terlalu tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat merosot. Harga – harga komoditas yang ada kaitanya dengan BBM akan naik, tetapi sebaliknya harga –harga komoditas pertanian tidak seluruhnya meningkat . Imbasnya nilai tukar petani atau masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian mangalami penurunan relatif yang mengkibatkan daya beli mereka melemah. Angka Inflasi yang mencapai dua digit tentunya mengakibatkan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah, sehingga menjadi sempat rendah nilai nominalnya.

Indikator nonekonomi sebagai salah satu dari unsur composif untuk mengukur kinerja pembangunan suatu daerah adalah tingkat pembangunan

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data time series di kab. Pekalongan menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif, pada tahun 2010 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 8.14%

dari seluruh penduduk . Pada tahun 2011 menjadi 12.50 %, kemudian pada tahun 2012 menjadi 10.55% dan tahun 2013 angka TPT berubah menjadi 9.40%. Data tahun 2014 belum tercatat di BPS kabupaten pekalongan. Data tahun 2012 dan 2013 menunjukkan tren penerunan,

tetapi angka pengangguran ini belum memuaskan jenis pengangguran lain yakni pengangguran terselubung. (*disquosed Unew plogment*) yang justru diberbagi daerah atau setara jumlahnya lebih besar dari pengangguran terbuka.

Tabel 5.8
TPT Kab. Pekalongan Tahun 2010 – 2013

TPT	2010	2011	2012	2013
Laki- laki	3.89	5.37	4.22	4.96
Perempuan	4.25	7.13	6.33	4.44
Total	8.14	12.50	10.55	9.40

Sumber : BPS Kab. Pekalongan 2014

Dilihat dari jenis kelamin proposi penduduk perempuan yang mencari pekerjaan lebuah banyak di dibandingkan dengan penduduk laki –laki hanya pada tahun terakhir (2013) jumlah penduduk laki – laki yang mencari pekerjaan lebih banyak dari pada penduduk perempuan dengan selisih tipis.

5. Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan

Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kab. Pekalongan selama kurun waktu 4 Tahun terakhir jumlahnya konstan meski presentasi turun.

Tabel 5.9
Penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kab. Pekalongan 2010-2013

Tahun	Juml Pend	Jumlah Pend Miskin	%Pendk Miskin	%Pendk Miskin Jateng
2010	842.223	136.600	16.29	16.11
2011	848.710	125.900	15.00	16.21
2012	854.287	116.500	13.86	14.98
2013	861.082	116.500	13.51	14.44

Sumber : BPS Kab. Pekalongan 2014

Data penduduk miskin ttahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka yang sama yakni 111.500 jiwa tetapi persentasenya menjadi turun karena pada tahun yang sama jumlah penduduk bertambah dari 854.287 menjadi 861.082 . Jadi dilihat dari jumlah atau kuantitasnya tidak berubah , sedangkan persentasenya menurun. Angka ini memang lebih baik dari presentaswe penduduk miskin Jateng yang masih sebesar 14.44%

6. Kesehatan

Para ahli umumnya menggunakan tiga indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial suatu negara atau masyarakat .pertama adalah :

- 1) Tingkat harapan hidup atau angka harapan hidup.

Angka harapan hidup (ANH) Kab. Pekalongan menunjukkan peningkatan , Data yang ada memperlihatkan kenaikan angka harapan hidup. Tahun 2010 ANH 69.01, Tahun 2011 meningkat menjadi 69,28, tahun 2012 maik menjadi 69. 53 dan tahun2013 menjadi 69.96. dilihat dari sisi ini terlihat tren positif

2) Tingkat kematian Bayi

Pada sisi lain jumlah kematian bagi yang baru lahir fluktuatif , data yang dikeluarkan oleh BPS Kab. Pekalongan menunjukkan terjadinya peningkatan diawal tahun 2010 jumlah atau kepala kemataian bagi bayi sebesar 11 anak. (tidak ada penjelasan per 1000 kelahiran atau dari total kelahiran). Tahun 2011 turun menjadi 11 anak dan tahun 2013 menjadi 10 anak. Terjadi fluktuasi kematian bagi

yang baru lahir ini adalah petunjuk belum merata dan meningkatnya pelayanan terhadap kelahiran bayi.

3) Tingkat Kematian Ibu melahirkan

Data jumlah kematian ibu melahirkan dapat dikatakan mengalami tren peningkatan. Hanya pada tahun terakhir yang tercatat saja. Angkanya mengalami penurunan namun tidak cukup signifikan angka kematian ibu melahirkan pada tahun pada tahun 2010 sebesar 127 (tidak ada catatan per berapa penduduk) tetapi setahun kemudian menurun signifikan menjadi 105, tahun 2012 meningkat tajam sekali menjadi 184 jiwa dan tahun 2013 menjadi 183. Apabila dari tiga indikator kesehatan ini digabungkan terlihat optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di kab. Pekalongan angka kematian baik bagi baru lahir maupun ibu yang melahirkan masih cukup tinggi.

7. Pendidikan

Ada tiga indikator untuk mengukur sejauh mana proses pembangunan di suatu negara/masyarakat di laksanakan. Pertama adalah

- 1) Angka melanjutkan sekolah dari SD ke SLTP
- 2) Angka melanjutkan sekolah dari SLTP ke SLTA
- 3) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Memang masih ada satu indikator lagi yakni angka melek huruf, namun sering kali indikator ini tidak banyak dipakai karena asumsi bahwa pada masa milenium ini pendidikan dasar merupakan suatu keniscayaan.

- 1) Angka melanjutkan sekolah dari SD ke SLTP

Terdapat data yang lebih komplit mengenai hal ini. Data tahun 2009 menunjukkan angka sebanyak 93.76% artinya sebanyak sekian persen anak yang

lulus SD melanjutkan Studi/sekolah SLTP, tetapi kemudian angka ini menurun. Pada tahun 2010 menjadi 80.40 %, tahun 2011 menjadi 84.38 %, tahun 2012 menjadi 85.17% dan tahun 2013 menjadi 84.48 % jadi jelas terjadi penurunan angka keberlanjutan studi dari kelulusan SD di Kab. Pekalongan.

- 2) Angka melanjutkan sekolah dari SLTP ke SLTA

Serupa atau idem distro dengan keberlanjutan studi / sekolah dari SD ke SLTP, angka melanjutkan sekolah dari SLTP ke SLTA juga mengalami tren penurunan atau merosot. Tahun 2009 angkanya 83,9% tetapi tahun 2010 merosot menjadi 74, 41%, tahun 2011 merosot lagi menjadi 71.91%, tahun 2012 merosot lagi menjadi 74.62%.

Dilihat dari rata-rata perkembangan selama 4 - 5 tahun, angkanya melanjutkan sekolah dan masuk ke pasar kerja atau menganggur.

- 3) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah yang tercatat di pemerintah daerah kab. Pekalongan tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti. Angkanya fluktuatif tetapi berpesar tipis sekali tidak ada kenaikan atau lonjakan yang signifikan hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pengembangan pendidikan belum optimum/ tidak optimum. Angka tahun 2009 tercatat rata-rata selama sekolah 6,66 tahun, tahun berikutnya tetap sama atau stgman 6,6 tahun, tahun 2011 naik sedikit 6,79 tahun, 2012 menjadi 6,8 tahun 2013 tetap pada angka 6,8. Sebagai perbandingan rata-rata lama sekolah penduduk di negara-negara maju lebih dari 12 tahun. Dua kali lebih lama dari pada rata-rata lama sekolah di beberapa negara berkembang.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Dilihat dari beberapa variabel yakni ekonomi makro dan variabel non ekonomi seperti sosial, pendidikan dan kesehatan ternyata kinerja pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, angkanya hampir dua digit yakni 9.0 %. Jumlah penduduk miskin

sebesar 113.500 jiwa atau 13.51 % dari total penduduk Kab. Pekalongan. Dilihat dari peringkat provinsi, Kab. Pekalongan menduduki ranking 22 Kab/Kota se Jawa Tengah.

2. Angka harapan hidup cukup tinggi tetapi angka kematian bayi baru lahir dan angka kematian ibu melahirkan

juga cukup tinggi yakni 10 bayi dan 183 jiwa ibu. Jadi dari tiga indikator variabel kesehatan ini dua diantaranya belum memperlihatkan kinerja layanan kesehatan yang optimum.

3. Angka melanjutkan dari SD ke SLTP awalnya di tahun 2009 cukup baik, tetapi kemudian merosot tajam. Pada tahun 2009 angka indikator ini 93.76 %, tetapi di tahun 2013 menjadi hanya 84.48%. Angka selanjutnya dari LTP ke SLTA juga mengalami hal yang sama. Pada tahun 2009 mencapai 83.9 %, namun pada tahun 2013 turun menjadi 74.62 %. Indikator ketiga yaitu rata - rata lama sekolah tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Tahun 2009 angkanya sebesar 6.66 tahun. Sedangkan pada tahun 2013 naik tipis sebesar 6,80 tahun.
4. Satu variabel lagi yakni variabel ekonomi makro menunjukkan bahwa indikator - indikator variabel ini seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan pendapatan perkapita belum menunjukkan angka yang mengesankan. Variabel ini memang sangat di pengaruhi oleh kondisi ekonomi makro , oleh karena itu kita

tidak dapat memberi kesimpulan bahwa seluruh gambaran ekonomi makro daerah adalah cerminan dari kinerja daerah tersebut.

5. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5.45%, namun pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan itu dibarengi dengan kenaikan angka inflasi ; tahun 2010 tercatat 6,54%. Tetapi pada tahun 2013 angka inflasinya juga meningkat 8,8%. Sedangkan pendapatan perkapita tahun 2012, 3.368.143, tahun 2013 pendapatan perkapita hanya sebesar 3.760.000. Apabila variabelnya di tambahkan dengan sumbangan / kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang hanya sebesar 17 %, maka secara ekonomi Kab. Pelalangan masih berada pada level rendah.

C.2. Saran

Diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kinerja pembangunan mengingat masih ada beberapa variabel yang belum dimasukkan di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Koencoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Korten, David C. 1980. *Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach: Public Administration Review*.
- Moeljanto. 1993. *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Seers, Dudley. 1973. *The Meaning of Development dalam Charles K Wilber (ed) The Political Economy of Development and underdevelopment*. New York: Random House.
- Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.